

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Institusi pemerintahan harus menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan karakteristik yang di syaratkan maka kualitas laporan keuangan akan mudah dipahami sehingga terbebas dari kesalahan. Dengan demikian, para pengguna informasi dapat menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan pengguna informasi dan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang Peranan Pelaporan Keuangan menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Kualitas informasi laporan keuangan adalah informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi sehingga informasi tersebut mendukung pengambilan keputusan (Yensi, dkk, 2014). Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2009 hlm. 20). Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah, masih banyak disajikan data yang tidak sesuai dan berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk menegakkan akuntabilitas khususnya finansial di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan (Sari & Witono, 2014).

Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam menyusun laporan keuangan. Dengan dimilikinya Sumber Daya Manusia yang berkualitas mampu meningkatkan kualitas Laporan keuangan. Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Pegawai yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, tidak mengikuti pelatihan-pelatihan akuntansi serta tidak punya pengetahuan yang memadai tentang akuntansi akan menemui banyak kesulitan dan hambatan dalam proses penyusunan laporan keuangan (Desmiyawati, 2014).

Selain Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat memengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Hal lain yang berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan adalah Pengendalian Internal Akuntansi. Pengendalian Internal Akuntansi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2008 tentang SPIP. Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Sehingga penerapan sistem pengendalian internal akuntansi mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangan (Mahaputra & Putra, 2014).

Kualitas informasi laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta menurun, menurut hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemberian opini WDP terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2015 merupakan yang ketiga kalinya secara beruntun. Pada 2013 dan 2014, Pemprov DKI juga mendapat hasil serupa. Salah satu kriteria yang dijadikan BPK dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yaitu efektifitas sistem pengendalian internal.

BPK RI berpendapat ada beberapa pengecualian yang dilakukan secara profesional untuk memberikan opini WDP. Pengecualian pertama menyangkut mengenai perbedaan data pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimana data tagihan PBB yang disajikan

belum bisa ditelusuri. Pengecualian kedua mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. PKB tidak sesuai dengan nilai buku pada tahun terhutang. Pengecualian ketiga adalah tidak tercatatnya piutang yang berasal dari konversi kewajiban perusahaan pengembang rumah susun untuk Pemerintah Provinsi DKI. Pengelolaan anggaran yang dilakukan Provinsi DKI untuk 2015 sudah lebih baik dibandingkan 2014. Semua pengelolaan keuangan memakai e-budgeting, dan tidak ada transaksi tunai, melainkan dilakukan lewat transfer yang tercatat secara detil.

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan hasil opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan oleh BPK apabila dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) DKI Jakarta memiliki Kompetensi SDM yang bagus karena Pemprov DKI Jakarta memberikan pelatihan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang telah mengadakan berbagai program diklat untuk mengembangkan kompetensi, pengetahuan, keahlian untuk para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengendalian intern yang diterapkan dalam kegiatan akuntansi sudah cukup baik seperti setiap kegiatan tidak bisa dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang, setiap pencatatan harus memiliki bukti yang kuat dan tidak boleh memiliki bukti ganda, setiap biaya yang dikeluarkan telah memiliki anggaran dari satu tahun sebelumnya semua telah dianggarkan dengan baik. DKI Jakarta memiliki teknologi informasi yang cukup canggih contohnya seperti Pengelolaan anggaran yang dilakukan Provinsi DKI untuk 2015 sudah lebih baik dibandingkan 2014. Semua pengelolaan keuangan memakai e-budgeting, dan tidak ada transaksi tunai, melainkan dilakukan lewat transfer yang tercatat secara detil.

Penelitian ini mengikuti penelitian syarifudin (2014) untuk variabel kompetensi sumber daya manusia ( $X_1$ ), sedangkan variabel pemanfaatan teknologi informasi ( $X_2$ ) dan variabel pengendalian internal akuntansi ( $X_3$ ) menggunakan variabel yang dipakai dalam penelitian Desmiyawati (2014). Adapun Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta dan waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2017.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah yang terdapat dalam Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

- b. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- c. Apakah Pengendalian Internal Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang di rumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada perangkat SKPD terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi pada perangkat SKPD terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal Akuntansi pada perangkat SKPD terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi Pemerintah Daerah, para akademisi, dan regulator. Adapun manfaat yang diberikan antara lain:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal Akuntansi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Akuntansi yang memengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jurnal acuan untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitiannya.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pertimbangan bagi organisasi yang menghadapi masalah serupa dan tentang pentingnya kualitas

informasi laporan keuangan pemerintah. khususnya pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

